

GAUDEAMUS: 75 TAHUN BASIS

BASIS

nembus fakta

SINERJISASI

Karl Rahner:
Kejujuran Intelektual
terhadap Misteri

HARYATMOKO

Kapitalisme
Pemangsa Bangkai

CHANEL ARIFIN MOCHTAR

Membaca Arus Balik Otoritarianisme
dan Demokrasi yang Merapuh

CHRISWINDA DL

Polisi kok Sipil?
Hakikat Polisi dan
Kemanusiaan

FRANK KARNER & FRANK MARINUS SUSENO

Syukuran
Sesudah 65 Tahun
di Indonesia

YUNIARNUGROHO

Membaca
Res Republika
"Tanda-Tanda Zaman"
Indonesia Saat Ini

FRANK KARNER &
FRANK MARINUS SUSENO
KARYA BUKU TERBARU, 2026

Membaca *Res Publica*
“Tanda-Tanda Zaman”
Indonesia Zaman Ini

YANUAR NUGROHO

Pada Maret 2026, tentang negeri ini, *The Economist* (16/03/26) menulis sesuatu yang mengejutkan, meski telah lama dirasakan: Pemimpin tertinggi negeri ini tengah “*jeopardising the economy and democracy*” (merusak ekonomi dan demokrasi).

Kata-kata itu menohok karena tidak datang dari oposisi domestik yang gampang dicap politis, tapi dari media bereputasi global.

Sebulan sebelumnya, Moody's dan Fitch masing-masing merevisi *outlook* peringkat kredit Indonesia menjadi negatif, mengutip buruknya tata kelola Danantara dan meluasnya kewajiban negara di luar anggaran. Pasar pun bereaksi. Rupiah melemah menembus rekor terendah Rp17.000 per dolar AS akibat kombinasi beberapa tekanan. Satu, ketidakpercayaan investor terhadap arah kebijakan; dua, gejolak geopolitik konflik Iran yang mendongkrak harga minyak; dan tiga, pengetatan kebijakan moneter AS yang melemahkan mata uang negara berkembang. Repotnya, di tengah tekanan eksternal ini, sinyal domestik yang muncul sebelumnya memperburuk keadaan: pengangkatan Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia memunculkan kekhawatiran serius—dan kemudian terbukti—bahwa batas antara kepentingan politik dan independensi moneter dikangkangi (*East Asia Forum*, 10/04/26), persis saat independensi itu paling dibutuhkan.

Selain itu, kondisi fiskal memperlihatkan betapa sempitnya ruang gerak pemerintah. Defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB. Artinya, tinggal selangkah dari batas legal 3 persen yang jika dilewati dapat memicu persoalan konstitusional sekaligus hantaman pada kredibilitas pasar. Di kuartal pertama 2026, defisit sudah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen PDB, sementara beban bunga utang diproyeksikan Rp599 triliun, setara 22 persen dari seluruh penerimaan pajak. Ini jauh melampaui ambang aman IMF 10 persen (*Asia Times*, Mei 2026). Selain itu semua, kenaikan harga minyak karena konflik Iran

membuat asumsi fiskal yang dibangun di atas harga minyak USD70 per barel tidak berlaku lagi saat Brent melewati USD100 per barel. Indonesia, menurut pemerintah sendiri, memasuki “*fiscal survival mode*”: Negara yang tak lagi bisa memilih prioritasnya, tapi mesti memilih mana yang lebih dulu dikorbankan (*Jakarta Globe*, April 2026).

Di dalam negeri, sinyal lebih mengkhawatirkan datang bukan dalam angka, tapi lewat peristiwa. Dini hari 12 Maret 2026, Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS yang mengkritik revisi UU TNI, disiram air keras di Salemba, Jakarta Pusat. Teror ini terjadi setelah ia selesai rekaman *podcast* tentang remilitarisasi dan demokrasi di kantor YLBHI. Akibatnya, ia mengalami luka bakar 20–24 persen di wajah dan tubuhnya. Enam hari kemudian, empat perwira militer dari unit intelijen, termasuk dari unsur Angkatan Laut dan Udara, ditangkap sebagai tersangka (*Reuters*, 18/03/26). Komnas HAM menerima pengaduan 12 orang yang mendapat ancaman terkait kasus ini (*Kompas.id*, 04/04/26). WALHI mencatat setidaknya 50 korban dari 10 kasus kekerasan dan SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation* atau Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik) terhadap pembela HAM dan lingkungan sepanjang 2025–2026. Jadi, jelas serangan terhadap Andrie bukan insiden tunggal, tapi bagian dari pola: Intimidasi digunakan sebagai kebijakan tak tertulis untuk membungkam suara kritis.

Pada Mei 2026, film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita*, yang merekam dampak Proyek Strategis Nasional dan kehadiran militer di Papua pada masyarakat adat, menjadi sasaran pembubaran paksa di

setidaknya 21 acara 'nonton bareng' (nobar) di berbagai kota oleh aparat TNI maupun tekanan tak langsung pada pihak kampus (YLBHI, siaran pers 11/05/26; Project Multatuli, 20/05/26). Alasannya, film itu "mendapat penolakan di media sosial" dan "tidak lolos sensor". Padahal, alasan itu salah kaprah: film komunitas non-komersial justru dikecualikan dari kewajiban sensor berdasarkan UU Perfilman. Pemerintah dan aparat lantas menyanggah. Ini justru lebih mengkhawatirkan lagi. Mengapa? Jika pemerintah benar tak memerintahkan pembubaran itu, berarti tentara bergerak sendiri tanpa kendali. Jelas, ini satu kondisi yang menunjukkan krisis tata kelola.

Semua itu bukan peristiwa tunggal. Semuanya tanda-tanda zaman—*signa temporum*—yang berbicara tentang situasi hidup bersama kita di republik hari ini. Dalam tradisi refleksi Kristiani, membaca tanda-tanda zaman—yang lalu dikenal dunia akademik umum sebagai *horizon scanning* (memindai cakrawala)—berarti melihat lebih dalam dari permukaan, atau dari sekadar, peristiwa: Apa yang sesungguhnya terjadi, ke mana arah geraknya, dan apa yang mesti dilakukan.

Esai ini undangan untuk melakukan persis hal itu: Membaca situasi Indonesia saat ini dengan jernih, dengan kepala dingin tapi hati berkobar karena yang dipertaruhkan adalah masa depan hidup bersama kita.

Membaca penanda: enam dimensi, satu pola

Saya meminjam tahap pertama dalam metoda *foresight* (pendekatan untuk membentuk masa depan) untuk membaca penanda-zaman ini. Ada enam dimensi: sosial, ekonomi, ekologi, teknologi, politik, dan nilai. Keenamnya tidak berdiri sendiri; mereka saling berkelindan. Dalam keadaan republik hari-hari ini, sayangnya, mereka terbacak saling memperburuk, tapi sekaligus—jika dibaca dengan benar—juga saling membuka jalan keluar. Dan di balik keenam dimensi itu, ada satu motor penggerak yang perlu dikenali: konsentrasi kuasa yang menggerus akuntabilitas dan mempersempit, bahkan menutup, ruang publik (*civic space*). Memahami keenam dimensi ini bukan cuma latihan intelektual. Tapi ia jadi prasyarat bagi setiap upaya memperbaiki keadaan.

Pertama, dalam dimensi sosial, ketimpangan makin terasa, tapi makin tak kasat mata. Secara statistik, angka kemiskinan Indonesia tampak membaik dari waktu ke waktu, tapi angka itu menipu. Koefisien Gini yang bertengger di kisaran 0,38–0,39 (BPS, 2025)

memperlihatkan ketimpangan yang tak membaik. Yang lebih mencemaskan adalah fenomena *squeezed middle*: kelas menengah yang perlahan terimpit dari dua arah. Mereka tertekan kenaikan biaya hidup dari atas, tapi terlalu 'kaya' untuk mendapat perlindungan sosial dari bawah (Nugroho, 2026c). PHK sepanjang 2024 hingga awal 2025 menelan lebih dari 250 ribu korban, sementara program bantuan sosial semakin ketat kriterianya. Jutaan keluarga hidup dalam zona abu-abu: Tak miskin menurut data, tapi tak aman dalam kenyataan hidup mereka. Inilah kemiskinan yang tak terlihat dalam angka, tapi amat terasa, khususnya di meja makan banyak keluarga setiap harinya.

Di lapisan sosial yang lain, fragmentasi komunal meningkat. Intoleransi terhadap kelompok minoritas, baik agama maupun identitas, bukan berkurang tapi hanya berubah wujud: dari kekerasan fisik terang-terangan menjadi peminggiran struktural yang lebih halus, tapi tak kalah menyakitkan. Sementara itu, kaum muda—Gen-Z dan milenial—menunjukkan gejala menarik: Mereka aktif berpolitik, tapi tidak melalui institusi. Protes jalanan, petisi digital, dan satire media sosial adalah kanal ekspresi mereka. Mereka tak apatis, cuma tak percaya pada lembaga yang ada (PRAKSIS, 2024). Ini tanda serius erosi kepercayaan yang menjadi perekat demokrasi.

Kedua, dalam dimensi ekonomi, kita saksikan pertumbuhan tanpa keadilan. Angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada kuartal I 2026 (BPS, 2026) disambut dengan euforia. Pemerintah merayakannya. Tapi yang lebih penting malah jarang ditanyakan: Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Pertumbuhan itu didorong terutama oleh konsumsi rumah tangga kelas atas dan belanja pemerintah yang terkonsentrasi pada program-program besar. Sementara sektor informal—di mana sekitar 60 persen angkatan kerja menggantungkan hidupnya—masih tertatih. Realisasi penerimaan pajak 2025 hanya 78,7 persen dari target (Kemenkeu, 2025), menandai lesunya daya beli dan lambatnya pemulihan ekonomi—khususnya dunia usaha. Defisit APBN nyaris menyentuh 3 persen, batas yang jika dilampaui bisa memicu konsekuensi hukum sekaligus keretakan kepercayaan pasar.

Di saat sama, arsitektur ekonomi makin sentralistik. Danantara yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan investasi BUMN menuai kritik karena minimnya transparansi dan potensi pemusatan kendali sumber daya negara di tangan segelintir orang. Tarif impor

AS 32 persen terhadap ekspor Indonesia mendorong pemerintah membuka keran impor lebih lebar sebagai “tawaran diplomasi”, tapi berisiko besar merugikan produsen domestik. Pembangunan yang mestinya menjadi perluasan kebebasan substantif warga justru makin jauh dari pemerataan (Sen, 1999). Saat pertanyaan tentang distribusi menjadi tabu, pembangunan kehilangan dimensi etiknya.

Ketiga, dimensi ekologi menyadarkan bahwa kita selama ini membangun di atas bencana dan kerentanan yang kita rencanakan sendiri. Banjir bandang dan longsor yang menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 menelan korban ratusan jiwa dan merugikan ratusan ribu warga. Penjelasan mudahnya: anomali iklim. Tapi penjelasan yang lebih jujur menunjuk pada dua hal yang bertautan: model pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan selama puluhan tahun dan kapasitas manajemen bencana yang lebih berorientasi pada respons ketimbang pencegahan (Nugroho, 2025b). Ketika atas nama pembangunan kawasan hulu dikorbankan untuk perkebunan sawit dan izin ekstraksi diberikan tanpa menghitung daya dukung ekologis negara sesungguhnya sedang menanam bencana lewat kebijakannya. Dan kita tahu, fenomena alam itu hanya memanen apa yang ditanam oleh kebijakannya.

Tragisnya, ini terus berlanjut. Rencana *food estate* yang bertujuan mengonversi jutaan hektar lahan di Papua, Kalimantan, dan Sumatra tak belajar dari kegagalan serupa di era sebelumnya. Kapasitas negara mengelola risiko bencana (*risk governance*) lemah bukan karena tak ada institusi, tapi karena institusi tidak diberi insentif untuk bekerja preventif (Renn, 2008). Negara bergerak saat ada sorotan kamera; tapi pencegahan tidak memberi panggung politik. Akibatnya, kita terus membangun di atas fondasi yang rapuh, dan menyebutnya ‘kemajuan’.

Keempat, mestikah kita lihat kemajuan teknologi sebagai berkah atau instrumen dominasi? Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melampaui 100 miliar dolar AS (bruto) pada 2026, dengan pesatnya pasar kecerdasan buatan (AI) (Applabx, 2026). Microsoft, Google, dan Indosat membangun pusat data di dalam negeri. Pemerintah menyebutnya kedaulatan digital. Tapi di balik narasi kemajuan ini, ada dimensi lebih mengkhawatirkan. EngageMedia (2026) mendokumentasikan hampir empat kali lipat kenaikan insiden AI berbahaya di Indonesia sepanjang 2025 dibanding dua tahun sebelumnya. Ini termasuk

penggunaan teknologi pengintaian (*surveillance technology*) untuk melacak aktivis dan jurnalis, serta dampak algoritmik pada pekerja *gig economy* yang membuat jam kerja mereka lebih panjang dengan upah lebih rendah. Indonesia duduk di peringkat ke-84 pada Indeks Keamanan Siber Nasional, turun drastis dari peringkat ke-48 pada 2023, di bawah Filipina dan Malaysia. Serangan *ransomware* terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada Juni 2024 melumpuhkan 44 lembaga negara dan hampir 300 kantor pemerintah (*Indonesia Business Post*, 2026).

Teknologi hari ini memang bisa menjadi alat emansipasi dengan memperluas akses informasi, mempercepat layanan publik, memberdayakan warga. Tapi ia juga bisa menjadi instrumen kontrol untuk memantau, menyaring, dan membungkam. Yang menentukan bukan teknologinya, tapi siapa yang mengendalikannya dan untuk tujuan apa. Saat tata kelola teknologi tidak transparan dan regulasi perlindungan data lemah, yang tumbuh bukan kecerdasan publik, tapi kecerdasan yang mengawasi—bahkan mengekang dan mengancam—publik.

Kelima, dalam politik makin kita rasakan demokrasi yang prosedural dan otoritarianisme yang substantif. Indonesia masuk kategori *flawed democracy* menurut EIU (2025) dengan skor 6,37. Angka ini hasil dari penurunan tiga tahun berturut-turut. *Freedom House* mencatat penurunan 10 poin dalam tujuh tahun: dari 65 di 2017 menjadi 56 di 2025. Angka-angka ini memotret demokrasi di negeri ini yang perlahan makin tak punya isi.

Mietzner (2019) menyebut perkara ini “inovasi otoritarian”: Pemilu tetap berjalan, parlemen tetap ber-sidang, tapi tanpa substansi. Mekanisme *checks and balances* jadi formalitas. Parlemen terperangkap dalam koalisi nyaris sempurna—kecuali PDI-P yang secara formal tak jadi bagian dari koalisi, tapi prakteknya tak bisa menghindar dari tuntutan koalisi. Hasilnya? Tak ada yang bisa mengerem, apalagi mencegah, koalisi yang bulat mendukung penguasa yang memerintah. Lebih dari 659 calon kepala daerah pada Pilkada 2025 datang dari dinasti politik (Kenawas & Savirani, 2025), dan antara 14–23,8 persen anggota DPR 2024 punya ikatan keluarga dengan elite (Perludem, 2024). Oligarki bukan lagi gejala sembunyi-sembunyi. Kini, oligarki bertindak tanpa malu dalam terang benderang. Sementara itu, saat kritik terhadap kebijakan dijawab dengan represi, intimidasi, atau stigma, kebijakan dieksekusi dengan

logika preman, bukan logika hukum dan argumen (Nugroho, 2026a).

Terakhir, keenam, tentang pergeseran nilai yang menunjukkan erosi keadaban publik. Di balik semua gejala di atas, ada krisis yang lebih dalam: erosi nilai-nilai yang menopang kehidupan bersama. Lihatlah perkara korupsi. Korupsi jelas bukan hanya soal uang yang dicuri, tapi normalisasi ketidakjujuran. Saat pejabat korup tak dihukum tapi malah dipromosikan, pesan yang terkirim ke birokrasi—dan masyarakat—adalah: Integritas itu tidak menguntungkan. Juga saat berbagai kebohongan publik oleh pejabat yang terjadi berulang kali tidak dikritik tapi malah dirayakan, batas antara fiksi dan kenyataan di ruang publik mulai pudar.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah runtuhnya *epistemic trust*: kepercayaan pada kebenaran fakta. Saat data kemiskinan diragukan akurasinya, statistik keberhasilan program pemerintah tak bisa diverifikasi, atau audit independen ditolak, warga hidup dalam kegelapan informasi yang disengaja. Ini disebut Habermas “distorsi komunikasi sistematis” (1981). Artinya, ruang publik bukan lagi arena argumen, tapi arena narasi kuasa. Dan saat ruang argumen itu hilang, bukan cuma kebenaran yang lenyap, tapi kapasitas kolektif kita untuk bernalar bersama sebagai bangsa.

Apakah yang menggerakkan semua ini?

Keenam tanda zaman di atas tak berdiri dan tak terjadi sendiri-sendiri. Ada benang merah yang menyatukannya: Konsentrasi kuasa yang merontokkan akuntabilitas. Ini perlu dibaca lebih kritis, bukan sekadar sebagai kritik pada sosok atau rezim tertentu, tapi sebagai diagnosis struktural.

Pertama, matinya teknokratisme (Nugroho, 2025a). Sejak lama, Indonesia punya tradisi teknokrasi: kebijakan berbasis data, pengelolaan fiskal yang hati-hati, dan lembaga independen sebagai penyeimbang. Bahkan, kecuali soal lembaga penyeimbang, tradisi teknokrasi ini bahkan sudah ada sejak zaman Orde Baru. Tapi dalam pemerintahan Prabowo, tradisi ini mati—atau dimatikan—pelan-pelan. Program-program besar seperti MBG, KDMP, Sekolah Rakyat diluncurkan tanpa kajian teknokratis mendalam, tanpa *policy sandbox*, tanpa evaluasi terbuka. Kabinet yang gemuk dan sarat politisi memilih loyalitas di atas kompetensi. Ketika teknokrat hanya menjadi pelaksana teknis dan bukan perancang kebijakan, visi jangka panjang dan kemampuan belajar dari kesalahan juga turut lenyap.

“

Lebih
mengkhawatirkan
lagi adalah runtuhnya
epistemic trust:
kepercayaan pada
kebenaran fakta.
Saat data kemiskinan
diragukan akurasinya,
statistik keberhasilan
program pemerintah
tak bisa diverifikasi,
atau audit independen
ditolak, warga hidup
dalam kegelapan
informasi yang
disengaja.

Plato memperingatkan ini dua setengah milenium silam dalam *The Republic*: Negara yang adil adalah negara di mana rasio memimpin, bukan hasrat. Saat *epithymia*—hasrat kuasa—menjadi panglima kebijakan, keadilan pun ambruk.

Kedua, hegemoni tanpa konsensus. Yang lebih berbahaya dari represi terang-terangan adalah normalisasi ketaatan. Gramsci (1929–35) menyebutnya hegemoni: dominasi yang diterima bukan karena dipaksakan, tapi karena dianggap wajar. Ketika partai oposisi menyeberang ke koalisi, ketika kritik dilabeli “antipembangunan”, ketika akademisi memilih diam demi hibah, sebuah *silent consensus* terbentuk: Semua seolah setuju, padahal hanya takut. Dan ketakutan kolektif itu, diingatkan Hannah Arendt (1963), adalah substrat dari kedangkalan tata kelola: kebijakan yang berjalan karena rutinitas, bukan refleksi.

Ketiga, ekonomi politik rente yang terkonsolidasi. Di balik setiap program besar, selalu ada struktur insentif. MBG tak hanya soal gizi anak. Jelas MBG itu jaringan 21.102 dapur SPPG yang masing-masing mendapat insentif pajak Rp1,87 miliar per tahun, belum terhitung distribusi bahan baku dan peralatan (Nugroho, 2026b). Ketika anggaran publik menjadi arena distribusi rente, loyalitas politik jelas lebih menguntungkan ketimbang kinerja. Dan ketika kritik terhadapnya ditabukan—atau dijawab lewat intimidasi—lingkaran rente itu menutup dirinya sendiri. Hadiz & Robison (2004) menyebutnya *oligarchy in the age of markets*: Kekuasaan tidak lagi ditopang legitimasi publik, tapi kekayaan dan jaringan yang saling mengamankan.

Dari ketiga motor penggerak ini, jelas tampak persoalan kita hari ini bukan kegagalan teknis yang bisa diselesaikan dengan program baru atau anggaran lebih besar. Persoalan kita adalah krisis struktural: sistem insentif yang keliru, institusi yang lemah dan dirusak dari dalam, dan ruang publik yang menyempit. Kita mesti jujur mengenali ini.

Ke mana arah perubahan?

Membaca tanda-tanda zaman bukan cuma soal saat ini. Justru, perlu menggunakannya untuk mengantisipasi ke mana arus zaman ini bergerak.

Dalam jangka pendek, barangkali dua-tiga tahun ke depan, tekanan akan makin menguat dari berbagai arah bersamaan. Secara ekonomi, ruang fiskal jelas akan makin sempit: penerimaan pajak seret, defisit mepet batas aman, dan tekanan geopolitik (tarif AS, pelemahan

rupiah) memaksa pemerintah membuat pilihan-pilihan sulit. **Pemerintah sangat bisa** jadi akan mempertahankan program-program populis yang punya nilai politis, tapi **mengorbankan program-program** lebih substansif yang tak penting secara elektoral. Artinya, pembenahan tata kelola, **reformasi birokrasi**, dan investasi teknologi amat mungkin tertunda, atau sengaja ditunda. Sementara itu, kelas menengah akan makin tergerus dan sektor informal makin rentan.

Secara politik, risiko terbesar adalah normalisasi koersi negara. Sekali lagi: Saat legitimasi bergeser dari akuntabilitas ke konsolidasi kuasa, dan saat kritik dijawab dengan represi, demokrasi cuma ada secara formal tapi tanpa substansi. Levitsky & Way (2010) menyebutnya *competitive authoritarianism*: kompetisi formal berlangsung, tapi medan lagunya tidak *fair* karena satu pihak mengontrol semuanya—lembaga, sumber daya, dan narasi. Jika tak diintervensi, kita berjalan menuju *authoritarian resilience*: otoritarianisme yang bertahan dengan wajah demokratis (Diamond, 2002).

Dalam jangka menengah, mungkin lima—sepuluh tahun ke depan, situasinya mungkin berbeda. Perubahan masih terbuka, tapi tak ringan syaratnya. Ada sejumlah kecenderungan (*trends*) yang bisa menjadi pendorong perubahan positif. Satu, kaum muda Indonesia. Mereka akan mendominasi pemilu dalam lagunya 2029. Mereka ini punya kesadaran politik berbeda dan tak terikat loyalitas partai tradisional. Dua, digitalisasi. Meski ada risiko pengawasan (*surveillance*), digitalisasi membuka akses informasi dan konektivitas yang bisa memperkuat solidaritas sipil. Jelas, pengorganisasian gerakan digital dibutuhkan di sini. Tiga, tekanan internasional. Tekanan dari Lembaga pemeringkat kredit, mitra dagang, dan komunitas bisa menjadi insentif, bahkan pemaksaan, bagi perbaikan tata kelola.

Namun, perubahan tak datang dengan sendirinya. Perubahan selalu menuntut agensi yang secara kolektif bergerak: pilihan-sengaja individu, kelompok, dan gerakan yang memutuskan bertindak. Di sini, peran masyarakat sipil amat krusial.

Apa yang perlu dilakukan masyarakat sipil?

Ada empat agenda mendesak dan saling bertaut.

Pertama, *memulihkan dan memperluas ruang deliberasi sipil*. Demokrasi bukan cuma soal pemilu. Demokrasi juga soal kualitas percakapan publik yang menentukan pilihan kolektif warga. Organisasi masyarakat sipil

(CSO), kelompok advokasi, serikat buruh, dan komunitas warga perlu menyiapkan dan memperkuat kanal dialog yang lebih terbuka dan inklusif. Ini bukan hanya kanal protes, tapi kanal konstruksi alternatif. Ini juga berarti membangun jejaring forum diskusi lintas sektor, lintas aktor, bahkan lintas generasi. Tujuannya: memfasilitasi musyawarah warga tentang isu-isu konkret. Ini perkara penting untuk merebut ruang sipil yang makin menyempit di masa pemerintahan saat ini (Nugroho, 2024). Penting juga memperkuat media independen sebagai infrastruktur demokrasi. Habermas (1992) mengingatkan: Legitimasi keputusan publik hanya bisa datang lewat proses komunikasi yang bebas dari dominasi. Jadi, jelas bahwa ruang publik ini mesti direbut kembali, dan dirawat sebelum disemai.

Kedua, *membangun dan mempertahankan fungsi pengawasan*. Salah satu tanda zaman yang paling mengkhawatirkan adalah lemahnya *checks and balances*. Saat parlemen tak lagi bisa menjalankan peran ini, "audit sosial" oleh masyarakat sipil menjadi satu-satunya rem tersisa. CSO perlu mendokumentasikan pelanggaran, melaporkan ketidakberesan, dan mendorong akuntabilitas tak hanya lewat protes tapi juga litigasi, advokasi kebijakan, dan kerja sama dengan lembaga pengawas yang masih punya integritas, meski hanya sisa-sisa. Proyek-proyek besar pemerintah saat ini seperti MBG dan KDMP yang tidak transparan mesti dipaksa diaudit secara publik. Data yang tidak tersedia perlu ditagih. Kebenaran yang disembunyikan perlu digali. Ini cara, yang meski terlihat seperti dipaksakan dari luar, bisa memperkuat kapasitas negara untuk membangun (*state capacity to deliver development*) yang amat lemah di pemerintahan saat ini (Nugroho, 2024). Ingat kata Popper (1945): Kemajuan sosial bergantung pada kemampuan mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan.

Ketiga, *memperkuat solidaritas lintas sektor dan generasi*. Fragmentasi itu musuh perubahan. Kelompok-kelompok yang terdampak berbagai dimensi krisis seperti pekerja informal, petani yang terpinggirkan, komunitas adat yang kehilangan tanah, aktivis lingkungan, jurnalis yang terancam, perlu membangun koalisi yang lebih luas dan lebih "sabar" dari sekadar melancarkan protes. Anak-anak muda yang aktif di media sosial mesti terhubung dan "nyambung" dengan pengorganisasian di akar rumput. Para pemimpin komunitas lokal dan adat perlu terhubung dengan jaringan advokasi nasional. Perubahan mesti bertahan,

tak bisa hanya sesaat. Dan perubahan semacam itu hanya bisa lahir dari jejaring gerakan yang meluas, tak sekadar aksi yang "ramai" tanpa akar.

Keempat, *mendorong dan memperkuat peran akademisi sebagai intelektual organik*. Di sini, kita mesti bicara terus terang kepada sesama akademisi. Gramsci (*Prison Notebook #12*, 1932) membedakan "intelektual tradisional" yang memposisikan diri sebagai pengamat netral dan penjaga *status quo* dari "intelektual organik" yang tertanam langsung pada perjuangan kelompok yang diwakilinya dan berkontribusi aktif dalam perubahan sosial. Intelektual organik tak hanya menulis di jurnal yang cuma dibaca sesama akademisi, tapi mengartikulasikan kepentingan kolektif dalam bahasa yang bisa dipahami publik. Intelektual organik tetap memproduksi pengetahuan, tapi sekaligus membangun kesadaran kritis warga.

Di Indonesia hari-hari ini, mesti diakui akademisi menghadapi banyak tekanan, dan sering tak mudah: hibah penelitian yang bergantung pada relasi dengan pemerintah, jabatan struktural yang menuntut loyalitas, dan iklim yang membuat kritik dipandang ancaman yang membahayakan. Banyak akademisi memilih diam demi aman-diri-sendiri. Tapi jangan lupa, mereka yang diam dianggap setuju. Dalam bahasa Latin: *qui tacet consentire videtur*. Dan persetujuan yang diberikan dalam bentuk diam ini, khususnya terhadap ketidakadilan, adalah sebetulnya komplotitas (*complicity*) yang pelan-pelan menghancurkan integritas institusi akademik itu sendiri.

Yang dibutuhkan adalah keberanian yang oleh Kant (1784) disebut *sapere aude*: Beranilah berpikir sendiri. Dalam praktiknya, ini berarti akademisi mesti mau memublikasikan temuan meski tak nyaman bagi penguasa. Lembaga riset juga mesti mempertahankan independensinya dari tekanan politik dan korporasi. Perguruan tinggi pun harus menjaga tradisi perdebatan terbuka dan memberi ruang pada mahasiswa untuk mempertanyakan hal-hal mendasar. Dan, barangkali ini paling penting: Akademisi harus mau turun dari "menara gading". Mereka harus mau bicara dengan warga, menulis untuk publik, hadir dan bicara dalam forum umum yang tak hanya dihadiri sesama kaum cendekia. Inilah yang membedakan akademisi sebagai "intelektual organik"—tidak hanya sebagai ahli.

Konkretnya seperti apa? Satu, meneliti, membangun, dan memublikasikan basis data alternatif independen, khususnya tentang dampak program pemerintah pada

warga dan lingkungan. Beberapa hal bisa amat krusial seperti ketimpangan, kondisi kerentanan sosial-ekonomi-budaya, atau bahkan status ekologi kawasan—dan banyak lainnya. Ini semua memungkinkan warga sekaligus pembuat kebijakan bisa membandingkan angka dan klaim resmi dengan realitas lapangan. Dua, melakukan *action research* yang tak hanya menghasilkan laporan, tapi juga mendampingi komunitas membangun kapasitas. Ini penting agar penelitian sungguh membumi, melibatkan warga yang sering hanya jadi objek dan bukan subjek penelitian. Khususnya jika penelitiannya menyangkut dampak dan konsekuensi kebijakan. Tiga, terlibat dalam jaringan advokasi kebijakan seperti memberikan masukan berbasis bukti dan data kepada parlemen, lembaga pengawas, pemerintah, atau forum-forum publik. Data dan fakta mesti dikembalikan pada tempatnya sebagai basis debat dan deliberasi kebijakan pembangunan. Empat, membangun jejaring baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Jejaring ini penting untuk memperkuat suara sipil Indonesia di luar ruangnya sendiri. Sejarah mencatat, tekanan dari luar—baik regional, apalagi internasional—sering menjadi katalis perubahan internal.

Akhirnya: Bergembiralah dalam perjuangan!

Edisi majalah *Basis* ini mengambil tema "*Gaudeamus: Mari Kita Bergembira*"—untuk merayakan dua peristiwa: 75 tahun usia majalah ini dan 90 tahun usia pemikir Franz Magnis-Suseno. Tapi tema itu mungkin terasa bagai paradoks: apa yang mau dan perlu dirayakan dalam situasi seperti dibahas di atas?

Di situ, barangkali, letak kekuatan refleksi majalah ini dan pemikiran Romo Magnis selama ini. Kegembiraan sejati bukan kegembiraan yang menutup mata pada penderitaan, melainkan yang menemukan makna justru di tengah kesulitan. Bagi Romo Magnis, filsafat bukan

pelarian dari dunia, tapi cara lebih dalam memahami dunia. Filsafat mengajarkan: Realitas yang paling keras sekalipun bisa dibaca, dipahami, dan direspons dengan penuh martabat.

Tanda-tanda zaman yang disajikan dalam esai ini memang menggelisahkan. Tapi kegelisahan itu, jika disambut dengan kejujuran dalam pikiran dan tindakan, bukanlah sebuah pengingkaran apalagi dalam diam. Kegelisahan itu awal perubahan. Masyarakat sipil Indonesia sesungguhnya tidak lemah, hanya belum cukup terorganisir. Akademisi Indonesia jelas tidak bodoh, hanya belum cukup berani. Banyak warga Indonesia tidak apatis, hanya belum menemukan sarana untuk mewujudkan—nyatakan energinya.

Sejarah mengajarkan: Tak ada situasi dan kondisi permanen. Sistem yang kelihatan kuat pun runtuh saat ia tak lagi punya legitimasi. Yang menentukan bukan sekuat apa rezim yang saat ini ada, tapi seberapa ulet dan luas gerakan yang menandinginya.

Maka, bergembira tak selalu berarti merayakan keadaan. Bergembira juga berarti merayakan kemungkinan: bahwa perubahan itu mungkin dan nyata, bahwa tindakan itu bermakna, dan bahwa bersama—sebagai warga, sebagai akademisi, sebagai manusia yang memilih bermartabat—kita bisa membentuk masa depan yang lebih baik dari hari ini.

Dan meski terdengar klise, ungkapan ini sungguh benar adanya: Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak kita, siapa lagi? ●

Yanuar Nugroho, Ph. D.,

dosen STF Driyarkara, Jakarta,

Visiting Senior Fellow

ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura,

pendiri dan penasihat CIPG dan Nalar Institute.

RUJUKAN

- Applabx. (2026). *The state of artificial intelligence (AI) in Indonesia for 2026*. <https://blog.applabx.com/the-state-of-artificial-intelligence-ai-in-indonesia-for-2026/>
- Arendt, H. (1963). *Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil*. Viking Press.
- BPS. (2025). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2026*. Badan Pusat Statistik.
- Diamond, L. (2002). Thinking about hybrid regimes. *Journal of Democracy*, 13(2), 21–35.
- EIU. (2025). *Democracy Index 2025*. Economist Intelligence Unit.
- EngageMedia. (2026). *2025 is Indonesia's year of AI-ing dangerously*. <https://engagemedia.org/2026/2025-is-indonesias-year-of-ai-ing-dangerously/>
- Freedom House. (2025). *Freedom in the World 2025: Indonesia*. Freedom House.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Trans.). Lawrence & Wishart. (Original work 1929–35).